

EDITORIAL

Duniyana Stigma

Melepas stigma memang bukan urusan gampang, apalagi itu diproduksi dan direproduksi oleh tangan “gelap” sebuah rezim kekuasaan.

Dalam lembaran teori, stigma diperlihatkan sebagai sesuatu yang melampaui fakta. Artinya, ia sudah meninggalkan fakta asalnya dan bergerak membangun realitasnya sendiri – sebuah realitas “semu” yang dikesankan seolah-olah menjadi realitas nyata. Dan di balik itu, ia menciptakan nilai kebenarannya sendiri agar eksistensinya tak tersentuh untuk menjamin kelanggengannya.

Selain itu, stigma memang tak pernah menyediakan ruang klarifikasi. Nilai fakta empirik menjadi tak penting lagi, karena yang dimainkan adalah simbol dan citra, negatif. Itu sebabnya, kenapa sebuah stigma memiliki kekuatan supra-dahsyat, yang sulit dihilangkan.

Mungkin penjelasan mengenai stigma di atas masih hambar, karena hanya *mengawang-ngawang* di level teoritis, tapi coba tanyakan saja kepada para eks tahanan politik 1965 (eks tapol '65) di Sulawesi Tengah yang merasakan langsung bagaimana hebatnya belitan stigma itu. Susah-payah mereka melepasnya hingga di usianya yang tua, tapi banyak yang sia-sia.

Nasib para eks tapol '65 ini benar-benar tragis. Sudah mengalami berbagai siksaan dan pemaksaan selama di penjara, ketika keluar pun masih harus menghadapi stigma negatif dari masyarakat di kehidupan keseharian mereka saat ini. Padahal menurut data yang ada, kebanyakan dari mereka adalah korban salah tangkap dari kebringasan penguasa saat itu. Tapi lagi-lagi, stigma memang tak mengenal dan menyediakan ruang klarifikasi.[]

Redaksi

RANTAI PANJANG KERJA PAKSA TAPOL 65

Oleh: Ewin Laudjeng

Saat ini, lebih-lebih di kalangan anak muda, tak banyak yang tahu jika kegagahan kota Palu, Sulawesi Tengah, seperti yang tampak hari ini dulunya lahir dari tangan-tangan para Tahanan Politik (tapol) 1965. Beberapa situs pembangunan kota itu dibangun dari kucuran keringat mereka.

Sebagaimana yang dikisahkan oleh Maid Halim (70), hampir setiap hari tenaga para tapol itu digunakan secara paksa oleh militer untuk mengerjakan sejumlah proyek pembangunan tanpa diberi makan dan upah. Ditemui Media Desantara di rumahnya, lelaki bekas Tapol 1965 ini menuturkan kisah pahit hidup yang dialaminya ketika menjalani proses penyekapan di penjara Maesa Palu pada tahun 1966 yang silam. Selama 12 tahun, bapak dari empat anak ini menjalani proses penahanan. Selama itu pula, dirinya dan para tahanan yang lain diperlakukan secara tidak manusiawi oleh aparat militer. “Jika bukan distrum atau dipukul, kami disuruh mengerjakan gedung atau pembuatan jalan baru,” tutur Maid Halim.

Saban hari setelah sholat Subuh, aparat militer menggiring para tapol untuk dipekerjakan di sejumlah proyek pembangunan kota. Diantaranya adalah pembuatan tanggul Kalikoa.

Ketika itu, kata Maid Halim, Kota Palu dihantam banjir hebat. Air sungai meluap dengan deras merangsek masuk ke rumah-rumah penduduk. “Kami diminta untuk memasang bronjong di tempat itu agar bisa membendung luapan air sungai. Pekerjaan itu kami lakukan setiap hari, dari pagi sampai sore hari. Sangat jarang kami di beri makan,” kenang sedih Maid Halim. Proyek yang diberi nama Komando Kali Palu itu



JL. KESADARAN

dikerjakan para tapol dari tahun 1966 hingga tahun 1967.

Muski proyek tersebut sudah rampung, namun bukan berarti para tapol itu bisa istirahat dengan tenang dan menikmati makanan sebagaimana lumrahnya. Rantai kerja paksa itu terus memanjang. Berikutnya, mereka digiring untuk mengerjakan sejumlah proyek lain, seperti pembukaan ruas jalan Kimaja sampai dengan jalan Haji Hayun, ruas jalan Gatot Subroto dan Soeprapto di Kecamatan Palu Timur.

Ketika proyek itu selesai, kembali mereka digiring secara paksa untuk pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan Desa Kaluku Bula dengan Desa Biromaru (perbatasan wilayah Kota Palu dan Kabupaten Sigi Biromaru sekarang ini). Tempat itu kini diberi nama jalan Karanja Lemba.

”Proyek kerja paksa itu berlangsung secara berantai dan terus menerus. Selesai satu di

INSIDE THIS ISSUE:

Desantara Report	1
Testimony	5
Local Community	6
Profile	7
Vox Vocis	8
Multicultural Women	9
Citizenship	10
Representation	11
Desantara's Activities	12

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab:
M. Nurkhoiron

Pemimpin Redaksi:
Muhammad Kodim

Sekretaris:
Noviyana

Kuangan:
Darningsih

Redaktur Pelaksana:
Ingwuri H.

Tata Letak/Desain:
M. Isnaini "Amax"

Editor Bhs. Indonesia:
M. Nurkhoiron

Editor Bhs. Inggris:
Becca Taufiq

Penerjemah:
S. B. Setiawan

Staf Redaksi:
Frاندitya Utomo

Distributor:
Noviyana

Dokumentasi:
Rustam

Kontributor:
Jawa Barat: Abu Bakar, Isa Nur Zaman, Diphie. **Jawa Tengah:** Moh. Sobirin. **Jawa Timur:** Mashuri, Oryza Ardyansyah W., Ishomuddin, A'ak Abdullah Al-Kudus, Ahmad Rifa'i. **Bali:** Ni Komang Erviani. **NTB:** Muhammad Irfham. **Sulsel:** Mubarak Idrus, Hasmi Baharuddin. **Sulteng:** Ewin Laudjeng. **Sulbar:** Tamsil Kanang. **Kaltim:** Asman Azis, Abdullah Naim. **Kalbar:** Chatarina P. Istiyani. **Sumbar:** Ka' bati. **Sumut:** Farid Aulia. **Aceh:** Raihana.

Alamat Redaksi:
DESANTARA Foundation
Komplek Depok Lama Alam Permai Blok K3, Depok 16431
Website: www.desantara.org
Email Redaksi: mail@desantara.org, newsletter@desantara.org
(DEPORT)
Tlp: +62 21 77201121
Fax: +62 21 77210247

ISSN 1979-7354
9 771979 735446

lanjutkan lagi dengan proyek berikutnya," ucap Maid Halim. Misalnya ruas jalan Abdurahman Saleh, salah satu jalan utama menuju ke Bandar Udara Mutiara Palu. "Itu juga merupakan hasil keringat dari para tapol '65," katanya.

Cerita senada juga datang dari Bahrhun (69), salah seorang kawan Maid Halim yang juga bekas Ketua Pemuda Rakyat Kecamatan Biromaru, bahwa para tapol saat itu diperlakukan layaknya bukan manusia, tapi sudah menyerupai mesin. Mereka dipaksa mengerjakan proyek-proyek besar dalam rentang waktu yang lama, tanpa makan dan istirahat yang cukup. Sudah begitu, peralatan yang digunakan para tapol untuk pengerjaan jalan hanya berupa Linggis, Pacul, dan Skop. Tidak ada alat berat yang mereka gunakan seperti sekarang ini.

Para tapol '65, lanjutnya, dianggap sebagai orang-orang yang salah jalan, alias sesat. Hal itu tercermin dari pemberian salah satu nama jalan oleh aparat militer di Wilayah Tatura, Palu Selatan: Jalan Kesadaran namanya. Ceritanya, dimulai ketika jalan itu dikerjakan oleh para tapol. Setelah proyek selesai, aparat militer memberi nama tempat tersebut dengan jalan Kesadaran. "Itu dilakukan agar para tapol ini bisa sadar," kata Bahrhun menirukan ucapan salah seorang petinggi militer pada saat itu.

Stigma negatif yang dilekatkan pada

diri para korban tapol '65 ini berlanjut hingga sekarang. Selepas dari tahanan, mereka masih dipandang secara miring oleh masyarakat dan diperlakukan secara tidak adil baik secara sosial maupun politik. Seperti nasib Soekapto, tapol mantan pegawai negeri, tidak mendapatkan hak dana pensiun setelah ditahan pada tahun 1969. Dari data yang dihimpun oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Palu, di Sulawesi Tengah saat ini terdapat 512 tapol.

Dengan kenyataan seperti itu, menyandang satatus sebagai eks tapol '65 adalah beban berat yang sulit ditanggalkan. Dan, pengalaman semasa di tahanan, bagi orang seperti Bahrhun adalah pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya.

"Jujur saja, kalau mengingat kembali persoalan itu rasanya kita ini sengaja mau dimatikan saat itu. Karena sejak tahun 1966, kami ditangkap dan tidak ada proses hukum. Kami ditangkap seperti binatang, dimasukkan ke dalam sel selama 12 tahun tanpa mengetahui apa kesalahan kami," ucap Bahrhun sambil menarik napas panjang.

Bagi dia dan sejumlah kawannya, peristiwa itu menyisakan trauma berkepanjangan. Trauma yang sulit untuk di lupakan begitu saja. Kami berharap, agar peristiwa kekerasan politik yang terjadi tahun 1965 itu dapat diungkap, tidak disembunyikan begitu saja," katanya liris.[]

MEREKA MENANTANG TAMBANG

Oleh: Oryza Ardyansyah Wirawan

Musim hujan benar-benar menjadi saat menegangkan bagi warga Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Betapa tidak, saban musim itu, banjir selalu datang: puluhan rumah terendam air, belasan lainnya rusak dihantam tanah longsor. Kini, kecemasan itu kian bertambah ketika mereka mendengar kabar eksplorasi tambang mangan mulai digencarkan. Izin eksplorasi diberikan kepada CV Wahyu Sejahtera, dan dilakukan di wilayah hutan perkebunan. Luas area eksplorasi tambang sekitar lima hektare.

"Kalau tambang jadi, tentu kerusakannya lebih parah lagi," kata Imam Haramain, tokoh ulama di Silo yang juga Wakil Ketua Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Jember. Kerusakan yang dimaksud Haramain tentu saja kerusakan hutan yang akan menyebabkan bencana semakin menjadi-jadi.

Selain alasan tersebut, menurut Syaiful Isbar, tokoh setempat, warga menolak tambang juga karena lahan di Silo masih produktif dan penambangan terlalu dekat dengan pemukiman. "Tidak ada penambangan yang bisa menyejahterakan

masyarakat sekitar. Kalau ada, tolong diekspos besar-besar,” tantangnya.

Warga dan tokoh masyarakat terkejut dengan pembukaan tambang itu. Padahal, ungkap Haramain, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan pernah mendatangi salah satu tokoh, bahwa pembukaan tambang tidak akan diizinkan. Tiba-tiba muncul surat kepada kepolisian dari CV Wahyu Sejahtera agar menjaga alat-alat berat yang digunakan untuk menambang.

Syaiful Isbar, tokoh masyarakat setempat, mencurigai bahwa tambang mangan hanya fase awal bagi pembukaan tambang di lokasi lainnya. Hutan di Silo memang dikenal memiliki kandungan bumi mineral yang potensial. Isbar juga tak yakin yang dibidik adalah mangan. “Pasti emas,” katanya.

Dugaan ada ‘emas di balik mangan’ juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Jember Machmud Sardjuno. “Tidak mungkin yang dicari mangan, pasti emas. Jember sudah difoto udara, dan hasilnya memang ada kandungan emas cukup tinggi,” katanya. Kemungkinan manipulasi ini bisa terjadi karena perizinan eksplorasi mangan lebih mudah ketimbang eksplorasi emas. “Kalau dimanipulasi, jadi berbahaya,” tambahnya.

Apalagi, upaya permohonan persetujuan dari warga cenderung tidak transparan. Warga menuduh perizinan pembukaan tambang mangan dilakukan dengan cara yang tak patut. Salah satunya adalah memanipulasi tanda tangan warga seolah-olah mereka menyetujuinya. “Tanda tangan itu tak benar peruntukannya,” ujar Farid Mujib, salah satu warga.

Ceritanya terjadi sekitar bulan Agustus 2008. Sejumlah tokoh masyarakat diundang oleh perwakilan dari penambang untuk bertemu. Agenda pertemuan adalah membicarakan masalah tambang mangan. Sebagaimana layaknya rapat, ada kertas presensi yang ditandatangani. Dalam rapat itu, warga tidak menyatakan persetujuan terhadap kehadiran tambang. “Saya usul, kalau nambang di Pace, harus mengumpulkan dulu tokoh masyarakat dan kiai, dan harus ada survei lapangan terhadap daerah yang ada tambangnya,” tegas Mujib. Ternyata, beberapa bulan



HUTAN PINUS JEMBER

kemudian, warga mengetahui bahwa daftar hadir yang mereka tandatangani dalam rapat tersebut digunakan sebagai bukti persetujuan warga. Warga menjadi berang karena merasa ditipu.

Perlawanan pun mulai disusun. Sejumlah tokoh masyarakat dan kiai berkumpul untuk merapatkan barisan. Langkah awal adalah menyurati Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencabut izin eksplorasi tambang mangan. “Bagi ulama, menolak kerusakan lebih dikedepankan daripada mengambil keuntungan. Akibat tambang, lingkungan rusak, dan keuntungannya hanya dimanfaatkan sedikit orang saja,” kata KH Muchit Arif, salah satu ulama terkemuka di Silo.

Muski tidak mendapat dukungan secara institusional dari Nahdlatul Ulama, namun para ulama tak ambil pusing. Mereka akhirnya bergerak sendiri.

Dalam perjalanannya, gerakan rakyat dan para ulama ini kemudian mendapat sokongan dari Konsorsium Advokasi Rakyat Sekitar Tambang (KARST). KARST menyatakan, Kabupaten Jember memiliki

sedikitnya 48 titik daerah yang berpotensi mengandung mangan, terhampar mulai dari kecamatan Silo hingga kecamatan Puger.

Koordinator KARST Andi Sungkono mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jember sebaiknya memaksimalkan sumber daya alam di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan untuk menambah pendapatan daerah. “Penambangan adalah alternatif terakhir. Itu pun jika sudah ada teknologi yang aman dan ramah lingkungan,” katanya.

Desakan semakin menguat ketika ulama dengan berani menyatakan penolakan itu langsung di hadapan Bupati Jember Muhammad Zainal Abidin Djalal dalam sebuah pertemuan antara ulama dan pemerintah. Bupati menegaskan, sampai saat ini pemerintah kabupaten tidak pernah mengeluarkan izin penelitian maupun penggalian tambang emas. “Kalau mangan memang ada. Tapi itu masih penelitian. Tapi karena meresahkan masyarakat, saya sudah memerintahkan Kepala Disperindag untuk mencabut izinnya,” katanya.[]

“Bagi ulama, menolak kerusakan lebih dikedepankan daripada mengambil keuntungan. Akibat tambang, lingkungan rusak, dan keuntungannya hanya dimanfaatkan sedikit orang saja,”

PELARANGAN HAUL SAYIDINA HUSAIN DI CIREBON

Oleh: Abu Bakar



HAUL SAYIDINA HUSAIN

Kepolisian Kota Cirebon datang langsung ke lapangan untuk menghentikan acara peringatan Haul Sayidina Husain yang diselenggarakan di Keraton Kasepuhan Cirebon tanggal 7 Januari 2009 lalu. Mereka meminta panitia penyelenggara untuk membatasi acara hanya sampai pukul 23.00 WIB, atau segera bubar demi keamanan Kota Cirebon.

Alasannya sepele, pihak kepolisian merasa ditipu panitia karena dalam pengajuan izin mencantumkan Peringatan Tahun Baru Islam, namun dalam pelaksanaannya acara yang digelar adalah Haul Sayidina Husein yang tidak lain adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Kapolresta Cirebon AKBP Ary Laksmana mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki surat dari Pangeran Nasfudin (pihak Keraton Kasepuhan) mengenai pengakuan Pangeran Pra Arief Natadinigrat yang tidak mengetahui bahwa acara tersebut merupakan peringatan Haul Sayidina Husein, bukan perayaan tahun baru Islam yang jatuh pada bulan Muharam 1430H.

Namun permintaan tersebut ditentang oleh pihak penyelenggara. Aan Anwarudin, ketua Panitia Haul yang juga pengurus PMII Cirebon, menganggap bahwa penghentian tidak mungkin dilakukan sepihak di sela-sela ceramah KH. Said Aqil Siradj yang tengah berlangsung. "Apalagi hanya karena persoalan kesalahan pencantuman tema acara yang seharusnya peringatan

bulan Muharram," katanya saat itu.

Seperti dalam rencananya, Haul ini diselenggarakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Forum Komunikasi Muslim (FKM). Acara ini akan dilaksanakan di Gedung Islamic Center Cirebon (ICC), Jl. RA. Kartini, dengan menghadirkan KH Said Agil Siradj (Ketua PBNU) sebagai pembicara dan dibuka oleh Ketua MUI Kota Cirebon KH. Mahfud Bachrie. Tapi empat hari sebelum acara berlangsung, pengurus ICC menolak pelunasan pembayaran sewa gedung.

Panitia pun dibuat bingung oleh sikap ICC ini. Lantas mereka bertanya dan meminta alasan tertulis dari ICC mengenai hal tersebut. Namun, pihak ICC tak mau memberi klarifikasi mengenai alasan penolakannya kepada panitia. Karena tak diizinkan, dan mengingat hari pelaksanaan semakin dekat, panitia kemudian mengalihkan tempat acaranya ke Keraton Kasepuhan Cirebon.

Pada saat yang sama, pihak ICC Cirebon malah menerbitkan berita acara pembatalan pelaksanaan acara peringatan Haul Sayidina Husein di kantornya. Dalam release-nya, ICC menyatakan keberatan karena telah menerima masukan dan saran dari elemen umat Islam Cirebon yang tidak setuju acara peringatan Haul tersebut. Ketidaksetujuan ini disampaikan melalui SMS, telepon, maupun surat resmi

yang ditujukan langsung kepada MUI Kota Cirebon dan Islamic Center. Salah satu alasannya, mereka merasa acara peringatan tersebut mengandung unsur khilafiyah dan berbau Syiah, bertentangan dengan aqidah Ahlul-sunnah Waljamaah yang dikhawatirkan dapat merusak *ukhuwah* dan *salimul aqidah* yang selama ini terbangun di internal umat Islam.

Selain dua alasan di atas, pihak ICC mengaku tidak menerima manual acara dan proposal kegiatan secara tertulis dari panitia penyelenggara Haul. Dalam berita acara itu, dilampirkan beberapa pernyataan ormas Islam, Dewan Kemakmuran Masjid, serta Lembaga Pendidikan Islam yang mengaku keberatan diadakannya peringatan Haul Sayidina Husein.

Karena desakan itu, pihak kepolisian pun turut melarang acara Haul tersebut. Padahal, FKM telah melayangkan surat perizinan kepada pihak kepolisian jauh hari sebelumnya, tertanggal 1 Januari 2009. Namun, sejalan dengan adanya penolakan dari ICC, pihak kepolisian kemudian mengirimkan surat pemberitahuan kepada panitia penyelenggara bahwa perizinan tersebut tidak memenuhi syarat karena belum dapat menunjukkan rekomendasi serta izin tempat dari pengurus ICC Cirebon. Karenanya, penerbitan izin kegiatan tidak boleh dilaksanakan dan tidak dapat dipindahkan di seluruh wilayah Kota Cirebon. Kapolresta mengakui bahwa hal itu dilakukan atas desakan dan keberatan dari Pengurus Islamic Centre Kota dan MUI Kota Cirebon.

Respon Atas Pelarangan

Terkait dengan pernyataan ICC itu, kalangan *nahdliyyin* dan Keluarga Besar Nahdatul Ulama (KBNU) Cirebon meminta kepada ICC untuk mencabut pernyataannya. KBNU mengingatkan ICC untuk tidak membuat provokasi bernuansa SARA yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Sebagai sebuah lembaga yang merepresentasikan komponen umat Islam, ICC seharusnya mampu menerima perbedaan pemahaman dan pelaksanaan keagamaan yang sudah terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

KBNU juga meminta kepada Kapolresta Cirebon untuk lebih bersikap profesional dan proporsional dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan agar semua pihak menghormati tradisi keagamaan masing-masing, sehingga tercipta kondisi kehidupan keberagaman yang harmonis dan tidak saling menyestatkan.[]

Menyandang status sebagai eks tahanan politik (tapol) peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 bukanlah perkara mudah. Berbagai stigma negatif masih begitu kuat melekat dalam diri mereka. Akaibatnya, kehidupan bermasyarakat mereka saat ini harus berurusan dengan sekian hambatan, baik di ranah sosial, politik, maupun ekonomi. Paling tidak itulah yang dirasakan oleh mantan tapol '65 di Sulawesi Tengah yang dikeluarkan dari penjara antara tahun 1978 dan 1980 yang silam.

Semua tempat terkunci bagi kami. Saya tidak bisa menyalahkan penduduk desa, karena mereka juga hidup penuh tekanan pada saat itu," ungkap Bahrhun berupaya menenangkan pikirannya.

"Bagi warga desa yang ketahuan bergaul dengan kami, itu akan menjadi masalah besar jika di ketahui aparat militer. Bisa-bisa mereka juga akan mengalami nasib yang sama dengan kami," tambahnya.

Kala itu, di tengah kebijakan-kebijakan represif Orde Baru, tak ada yang bisa



BAHRHUN

SUSAH PAYAH MELEPAS STIGMA

Oleh: Ewin Laudjeng

Coba lihat dengan apa yang dialami oleh Maid Halim (70) ataupun Bahrhun (69). Keduanya kini menjadi petani desa dan hidup dalam garis kemiskinan berkepanjangan. Halim dan Bahrhun dipenjarakan oleh rejim Orde Baru selama 12 dan 14 tahun, tanpa ada proses hukum.

"Saat itu, kami dituduh ikut terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. Padahal kami tidak pernah tahu apa itu G 30 S," kata Bahrhun ketika ditemui DEPORT awal Januari 2009 di rumahnya di Desa Sibalaya Utara, Kab. Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah.

Kebingungan Bahrhun ini memang masuk akal. Sebab, dalam kenyataannya, para korban '65 sebagian besar adalah korban salah tangkap. "Saya tidak tahu apa-apa, tapi kok ditangkap," ungkapnya.

Isitilah G 30 S itu sendiri baru diketahui para tapol setelah mereka menjalani masa penyekapan dalam sel tahanan Maesa Palu pada tahun 1966. Sekitar 200 orang lebih yang ditahan di tempat itu hingga akhirnya dibebaskan pada tahun 1978 dan 1980.

Menurut Bahrhun, ketika para tahanan dibebaskan tahun 1980, ia mendapat perlakuan diskriminasi dari lingkungan setempat. Penduduk kampung tidak ada yang berani bergaul dengan dirinya. Karenanya, dia merasa tersisih dan terbuang dari lingkungannya sendiri. Perasaan itu masih masih hinggap sampai sekarang.

"Tidak ada satu jenis pekerjaan pun yang bisa kami kerjakan pada saat itu.

dilakukan Bahrhun. Ia hanya bisa membatin dan berusaha meyakini bahwa suatu saat nanti sistem akan kembali berubah. "Cepat atau lambat, pemerintahan otoriter Suharto pasti akan tumbang," katanya.

Cukup lama dia menantikan hal itu, hingga akhirnya merasa kesepian sendiri. Sebidang tanah yang masih tersisa, berusaha dia maksimalkan untuk sekadar menyambung hidup. Sambil menanam sayur-sayuran di kebun, dirinya juga berupaya keras agar warga desa bisa menerimanya kembali.

Namun, melepas stigma tentu bukanlah pekerjaan mudah. Proses itu cukup lama ia lalui, dan pastinya butuh kesabaran tersendiri. "Hingga akhirnya, warga desa bisa menerimanya kembali," ujar isterinya.

Tumbangnya rezim Suharto pada Mei 1998, ikut membawa angin perubahan bagi warga desa. Satu persatu mereka mulai berani berdatangan ke rumah Bahrhun untuk tukar pikiran tentang persoalan yang ada di kampung. Sedikit demi sedikit, belunggu stigma itu mulai luntur.

"Sejak itu rasa percaya diri saya mulai normal kembali seperti sediakala,"ucapnya.

Meskipun usia sudah terbilang tua, tapi tekad dan semangat juangnya masih cukup kuat untuk memikirkan persoalan yang ada di desanya. Tahun 2000 yang lalu, dia mengaku ketemu dengan beberapa aktivis dari Awam Green, salah satu Ornop (Organisasi Non Pemerintah), untuk membicarakan sistem penguasaan tanah di desanya.

Selama ini, kata dia, sistem penguasaan tanah di desanya sebagian besar sudah dikuasai oleh A Huang, salah satu tengkulak di desa itu. Banyak petani yang kehilangan tanahnya akibat adanya sistem ijon yang di terapkan tengkulak itu di desanya.

Selain itu, lanjut dia, akses warga desa setempat terhadap hutan sudah semakin sempit akibat adanya penetapan pal batas Taman Nasional Lore Lindu pada tahun 1993 yang lalu. Akibatnya, masyarakat tidak punya tempat lagi untuk menggantungkan hidup.

Dulunya, sempat ada upaya protes yang dilakukan oleh masyarakat ketika penetapan pal batas. Tapi upaya itu terhenti gara-gara mereka dituduh PKI gaya baru. Kampanye hitam seperti itu, terang Bahrhun, selalu digunakan pemerintah pada saat itu untuk mengenyahkan setiap gerakan yang mencoba menghadang kepentingannya.

"Ini harus diubah. Mana mungkin perekonomian petani bisa maju jika mereka tidak menguasai sumber-sumber produksi," gugat Bahrhun.

Karenanya, siapapun yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, dia harus mampu menjawab persoalan yang ada di desa sekarang ini. Sebab jika tidak, sistem perekonomian kita akan tetap hancur. Demikian wejang Bahrhun.[]

TENGANAN, MENJAGA TRADISI DI TENGAH MODERNISASI

Oleh: Ni Komang Erviani



Se pintas, tak ada yang istimewa dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan --sebuah desa tradisional di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Gerbang utama desa hanya berupa gapura sederhana dengan lebar tak lebih dari satu meter.

Namun di balik gerbang sempit itu, bangunan-bangunan tua yang terstruktur dari kayu dan batu kali berlumut tampak berdiri kokoh. Kerbau-kerbau bebas berkeliaran di antara aktivitas masyarakat adat. Alunan musik selending --seni musik tradisional yang diperkirakan hidup sejak zaman Bali Kuno-- terdengar merdu dari kejauhan. "Ini alat musik sakral yang tidak boleh dimainkan sembarangan. Hanya boleh dimainkan pada upacara-upacara besar," ungkap I Nengah Timur, Kelihan Adat Desa Tenganan Pegringsingan. Kelihan adat adalah sebutan untuk pemimpin adat di Bali.

Sore itu, awal Februari 2009, masyarakat adat Tenganan tengah berkumpul di Bale Agung, balai pertemuan masyarakat adat Tenganan. Para laki-laki bertelanjang dada dengan bawahan kain dan destar (penutup kepala tradisional Bali--red) di kepala. Para wanita setengah baya menggunakan kain sebatas dada dengan rambut *mepusung* (disanggul--red). Sementara para gadis tampil istimewa dengan kain gringsing (kain tenun tradisional khas Tenganan--red) melilit di badan dan hiasan bunga emas di kepala.

"Hari ini, kami merayakan Usabha Kasa," tutur Timur. Usabha Kasa merupakan upacara adat Tenganan untuk menyambut tahun baru berdasarkan penanggalan Tenganan. Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu dari sejumlah desa kuno di Bali yang pola kehidupan

masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat desa Bali Aga (pra Hindu). Tenganan memiliki kalender sendiri yang hanya berlaku di wilayahnya. Itu sebabnya, tahun baru di Tenganan kali ini jatuh pada awal Februari lalu. Padahal berdasarkan penanggalan Bali, tahun baru seharusnya jatuh pada Maret.

Masyarakat Tenganan memercayai bahwa mereka keturunan India. Keyakinan itu terbukti dengan adanya riset genetik terhadap sampel darah 18 penduduk Tenganan oleh tim gabungan ilmuwan Indonesia dan Swiss pada tahun 1978 yang menemukan adanya kesamaan suatu enzim antara mereka dengan masyarakat asal Calcuta, India. Hal ini diperkuat oleh kesamaan ritual antara penduduk Tenganan dan masyarakat India. Seperti pada ritual *geret pandan*, ritual tahunan berupa perang dengan pandan berduri untuk menghormati dewa perang. Sebuah ritual yang juga dilaksanakan masyarakat India. Kesamaan itu juga tampak dari kain tenun gringsing yang merupakan salah satu ciri khas masyarakat Tenganan, yang diduga memiliki persamaan dengan kain patola dari India.



Menyiasati Modernisasi

Menerima modernisasi, tapi tak meninggalkan tradisi. Begitulah sikap yang tampak pada masyarakat adat Tenganan yang kini jumlahnya mencapai 660 jiwa.

Mereka memang tak bisa mengelak sepenuhnya dari pengaruh modernisasi. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan

pariwisata Tenganan akibat penetapan desa ini sebagai desa wisata kuno. Tak heran bila di antara bangunan-bangunan kuno Tenganan, ada rumah yang dimodifikasi dengan lantai keramik dan atap asbes. Ada tulisan "weaving demonstration" di beberapa rumah warga yang disulap menjadi artshop. Di antara kerbau-kerbau yang berkeliaran, raungan sepeda motor juga tidak dapat dihindari. Hanya kendaraan roda empat yang tak mungkin masuk ke areal desa, karena struktur jalan desa yang berundak-undak.

Perkembangan pariwisata Tenganan sejak 50 tahun terakhir juga telah mengubah struktur ekonomi mereka. Pertanian sudah tak lagi menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Tenganan. Lahan sawah milik masyarakat kini digarap oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Sementara masyarakat Tenganan sendiri menggantungkan hidup dari kegiatan pariwisata, seperti menjadi perajin tenun gringsing, perajin anyaman ate, pembuat lontar, serta menjadi pemandu wisata.

Namun di balik hingar-bingar modernitas, mereka tetap memegang teguh nilai tradisi leluhurnya, yang sekaligus dipakai sebagai tali pengikat agar tak sepenuhnya larut dalam arus modernisasi. Itu tercermin dari bagaimana mereka tetap memertahankan awig-awig (aturan adat--red) sebagai tuntutan hidup yang sangat dihormati.

Awig-awig Tenganan menghargai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dengan menerapkan hak waris yang sama. Masyarakat Tenganan juga memiliki hak yang sama atas tempat tinggal. Itu sebabnya seluruh rumah yang ada di desa itu berjajar rapi dengan ukuran sama. Desa Adat Tenganan menyediakan lahan tempat tinggal bagi warganya yang baru menikah.

Awig-awig juga tegas mengatur peruntukan lahan di Tenganan. Masyarakat Tenganan tidak boleh menjual atau menggadaikan tanah kepada orang luar Tenganan. Hal inilah yang menyebabkan luas wilayah Tenganan yang mencapai 917 hektar, hingga saat ini masih utuh, sama seperti pada abad ke-11 silam.

Inilah yang membuat Tenganan tetap mampu merawat tradisi. "Pengaruh-pengaruh luar tentu saja tidak bisa dihindari, apalagi kami selalu bersentuhan dengan dunia luar melalui wisatawan yang datang ke sini. Sepanjang pengaruh itu tidak merusak nilai-nilai tradisi leluhur kami," tegas Timur.[]



I Mangku Widia:

KAMI TETAP MENJAGA NILAI TRADISI

Oleh: Ni Komang Erviani

Perkembangan pariwisata di Desa Adat Tenganan semula tak membuat I Mangku Widia khawatir. Namun ketika suatu hari, di tahun 1999, ada serombongan turis datang ke Tenganan dan pergi meninggalkan seongkok sampah pembungkus makanan di hutan, tokoh adat Tenganan ini merasa tertantang membangun wisata berwawasan ekologis di wilayahnya bersama-sama dengan sejumlah generasi muda Tenganan dan Yayasan Wisnu—sebuah yayasan bidang pemberdayaan masyarakat. Selain untuk menjaga lingkungan di desanya, ia juga berharap upayanya dapat membantu menjaga nilai-nilai tradisi leluhur Tenganan.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana gagasan wisata berwawasan ekologis tersebut, kontributor DEPORT wilayah Bali Ni Komang Erviana bertamu ke kediaman I Mangku Widia yang merupakan mantan Kelihan Adat Tenganan di kediamannya. Sambutan hangat dari tuan rumah membuat obrolan siang itu semakin begitu akrab, muski baru ketemu. Berikut petikan wawancaranya:

Apakah perkembangan pariwisata di Desa Tenganan telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Tenganan?

Tentu saja mempengaruhi. Hal itu tidak bisa dipungkiri. Sisi positifnya memang adanya peningkatan ekonomi di masyarakat kami. Tetapi sempat ada dampak-dampak negatif, terutama ketika ada wisatawan yang

tidak memperhatikan masalah lingkungan. Dulu, pernah ada wisatawan yang datang dan membuang sampah sembarangan di hutan kami. Padahal bagi kami, hutan adalah tempat yang harus dijaga. Makanya kami merasa perlu ada upaya untuk mengatur pariwisata di Tenganan ini agar menjadi lebih ramah pada lingkungan.

Bagaimana upaya Anda?

Kami tengah mengupayakan ekowisata desa. Jadi wisata yang lebih menekankan pada sisi ekologis. Sehingga lingkungan lebih terjaga. Ekowisata desa ini tengah kami upayakan dengan bekerjasama dengan Yayasan Wisnu. Kami ingin Tenganan ini tidak rusak hanya karena kedatangan pariwisata.

Apakah nilai-nilai tradisi leluhur Tenganan terancam dengan adanya pariwisata?

Nilai-nilai tradisi leluhur tetap kami pegang di Tenganan. Kami tidak mau pariwisata merusaknya.

Bisa dijelaskan contoh nilai tradisi yang masih dipegang?

Contohnya saat *selonding* (alat musik tradisional yang disakralkan-red) dimainkan, kami selalu mengingatkan wisatawan agar tidak merekam dengan handycam atau tape perekamnya. Karena kami memiliki kepercayaan bahwa *selonding* adalah alat musik sakral. *Selonding* tidak boleh ditabuh selain pada waktu ketentuannya, tidak boleh jatuh ke tanah, dan tidak boleh diraba oleh seseorang yang dari luar Tenganan. Kalau terjadi seperti itu, *selonding* harus kembali disucikan dengan ritual khusus.

Bagaimana Tenganan memandang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan?

Sistem di sini jauh lebih baik. Kami melihat

laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama. Semua mendapat hak waris yang sama, satu berbanding satu. Anak terkecil mendapat pembagian rumah. Begitu kawin, mereka harus memilih pekarangan kosong dan membuat rumah baru. Jadi tidak ada perbedaan antara masyarakat adat laki-laki dan perempuan. Makanya nanti kelihatan sekali *krama* (perangkat adat-red) harus sepasang suami istri utuh. Salah satu meninggal, turun dari jabatan.

Anaknya kawin, turun dari jabatan; berpoligami, turun dari jabatan. Jadi hubungan suami istri kami pandang sebagai sebuah keseimbangan.

Jadi hubungan suami istri kami pandang sebagai sebuah keseimbangan.

Apakah aturan adat cukup kuat menekan arus modernisasi?

Tentu saja. Kami memiliki aturan adat yang sangat kuat. Misalnya dalam menjaga lingkungan, kami punya aturan adat yang tegas mengatur peruntukan lahan. Sawah harus tetap jadi sawah, hutan harus tetap jadi hutan, pemukiman harus tetap jadi pemukiman. Tidak boleh ada tanah yang dijual. Jadi lingkungan tetap kami jaga. Contoh lain adalah aturan yang tidak memperbolehkan tanaman di lingkungan desa ditebang sembarangan. Masyarakat Tenganan tidak boleh menebang tanaman sembarangan. Walaupun ada pohon yang tumbang, akan menjadi hak desa adat untuk dikelola menjadi fasilitas umum di desa.

Apakah ada kekhawatiran adat Tenganan akan terkikis oleh modernisasi?

Kami sama sekali tidak khawatir karena semua warga adat menyadari perannya masing-masing.[]

Degung Santi Karma (Antropolog),

ROMANTISME MELANGGAR HAM

Oleh: Ni Komang Erviani

Romantisme, begitu pikiran kita tentang orang di Tenganan. Saya kira orang Bali dan orang luar Bali yang melihat Tenganan sudah tercekok. Bahwa masyarakat Tenganan sudah tidak bersatu dengan alam, masyarakat Tenganan sudah komersial, dan lain-lain. Cara pandang seperti itu saya pikir sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Kalau bagi saya, pandangan yang seperti itu sama saja dengan pelanggaran HAM.

Kenapa saya sebut itu pelanggaran HAM? Karena kita mengingkari kondisi yang ada. Di sana ada paradigma pengingkaran bahwa manusia Tenganan adalah juga manusia seperti kita sendiri, yang penuh dengan konflik, yang sudah komersial, yang juga ingin mencari untung, yang juga punya motif-motif tertentu.

Tanpa kita mampu mengubah paradigma

itu, saya kira kita akan mengulangi gambaran-gambaran yang sama. Apa yang telah dipikirkan orang luar tentang Tenganan, kalau kita tidak segera mengubah itu, saya kira kita akan terus terjebak dalam pengulangan-pengulangan seperti itu. Tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya terjadi di sana.

Kalau saya sendiri melihat orang Tenganan, saya kira mereka sama saja dengan orang-orang Bali lainnya. Saya kira persoalan yang mereka hadapi tidak jauh beda dengan persoalan yang dihadapi orang Bali pada umumnya, bagaimana kita mempertahankan adat, bagaimana kita survive hidup.

Persoalannya sekarang, ketika orang Tenganan mulai menghadapi dunia bisnis, kenapa kita sekarang begitu terkejut? Apakah masalahnya hanya karena mereka itu orang Tenganan? Saya kira tidak. Karena

mereka juga memiliki pandangan yang eksotis dan romantis seperti itu. Melihat orang Tenganan, oh ini sudah komersial, oh ini sudah ada TV.

Itu kan sebuah pelanggaran HAM juga khan? Kenapa sih mereka harus beda dengan kita? Ini mungkin ada kesalahan dalam ilmu sosial yang kita pelajari tentang suatu masyarakat lain. Dalam ilmu sosial yang kita pelajari, masih dicekoki kuat dengan pikiran seperti itu. Saya kira masyarakat di manapun, dia akan penuh dengan kontradiksi. Dia akan penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan gosip, penuh dengan rumor. Namun pemaknaannya mungkin sedikit berbeda. Misalnya kalau di sana, masih ada penyelesaian yang sifatnya komunal.

Pandangan orang tentang Tenganan lebih bagus, saya kira hanya romantisme. Saya kira kita sama saja.[]



I Made Suarnatha, Direktur Yayasan Wisnu:

BIJAK SEBAGAI SISTEM TRADISI

Oleh: Ni Komang Erviani

Derasnya gempuran modernitas tak menggoyahkan kebudayaan Tenganan. Bujuk rayu kapitalisme pun tak membuatnya kepincut. Intensitas pengalaman interaksinya dengan kebudayaan luar justru mengentalkan nilai-nilai tradisi yang dipunyainya. Berikut pandangan I Made Suarnatha terhadap budaya Tenganan:

Kalau diperbandingkan antara Tenganan dengan desa adat yang lain, selama ini masyarakat Tenganan masih bisa mempertahankan budaya setting keruagannya dengan ritualnya. Padahal mereka banyak sekali bersentuhan dengan budaya luar lewat perkembangan pariwisata. Mereka bisa beradaptasi dengan kultur yang baru.

Secara setting ruang sosial, politik, dan ekonomi, mereka tetap utuh sebagai sebuah aturan adat dan itu memberikan kesejahteraan kepada warganya. Nah

kalau kita bicara di tempat lain, ternyata terjadi perubahan yang begitu cepat akibat pariwisata. Kekurangan lahan, kemiskinan terjadi, karena mungkin memang sistemnya tidak kuat menjaga itu. Karenanya, Tenganan dianggap lebih baik, lebih sustainable. Contohnya, dari hutannya mulai abad 11 sampai sekarang masih utuh dan itu masih dimanfaatkan secara maksimal. Untuk kesejahteraan, ritual, dan kebutuhan lainnya, tetap dari sana.

Lalu, bagaimana konsep Budaya Tenganan di mata Suarnatha? Pemahaman saya, Tenganan menerjemahkan konsep filosofis keseimbangan utuh. Dalam artian setting keruagannya, seni, kepemimpinannya, utuh. Misalnya laki-laki dan perempuan, kalau tidak dipasangkan *enggak* balance. Di Tenganan, secara kuasa struktural kelian itu adalah pasangan, laki-laki dan perempuan. Jadi hak untuk mengambil keputusan adalah sama. Secara waris, juga sama. Perempuan mendapatkan hak atas tanah,

laki-laki juga.

Menarik sebagai sebuah desa kecil, ada satu wisdom dari masyarakat Tenganan. Mereka melihat orang tidak hitam putih. Setiap pelanggaran aturan adat disikapi secara tegas tapi penuh makna. Misalnya bagi masyarakatnya yang melakukan kesalahan, tidak langsung diusir dari desa, tapi dipertimbangkan beberapa ketentuannya. Jadi bijak sebagai sebuah sistem tradisi.

Mengenai image bahwa aturan adat Tenganan keras, Suarnatha menampikinya. Menurut saya, Tenganan bukan keras. Kalau tenganan sebagai republik, sadar betul dia atas aturannya. Contoh laki dan perempuan, hak atas dirinya jelas. Hak atas sumberdaya di desa itu sudah jelas. Dan semua aturan itu sudah disosialisasikan mulai proses dari mudanya. Ada supervisi dari senior untuk mempelajari konsepsi ritual mereka.[]

KESETARAAN DALAM BUDAYA TENGANAN

Oleh: Ni Komang Erviani

Lima bulan menjalin kehidupan rumah tangga dengan suaminya, Ketut Widana (36), Ni Wayan Sumartini (27) mengaku sedikit kerepotan melaksanakan tugas-tugas adat di desanya, Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. “Ternyata lumayan susah. Agak kaget juga, karena saya dulunya jarang tinggal di rumah. Harus belajar dari awal, kayak training,” ujarnya.

Menjalani aktivitas adat menjadi hal baru bagi Sumartini. Apalagi perempuan yang bercita-cita bekerja di bidang pariwisata ini sudah cukup lama merantau. Ketika duduk di bangku SMA, ia memilih bersekolah di Kota Amlapura --sekitar 12 km dari Tenganan. Selepas SMA, Sumartini memilih kuliah di jurusan Diploma 3 Pariwisata Politeknik Bali di Kabupaten Badung Bali --sekitar 75 km dari Tenganan. Semasa kuliah, Sumartini tinggal bersama keluarga pamannya di ibu kota Kabupaten Karangasem dan hanya pulang rata-rata satu bulan sekali. Usai kuliah, Sumartini memilih tetap merantau dan bekerja di Denpasar.

Namun keinginan Sumartini untuk merintis karir di perantauan, nyaris pupus. Aturan adat yang sangat mengikat, memaksanya untuk tetap tinggal di desa. “Setiap bulan selalu ada acara adat. Jadi nggak bisa ditinggal,” terang perempuan yang berhenti berkarir sejak menikah. Ia pun kini harus berubah penampilan. “Saya nggak boleh memotong rambut, karena bisa dapat teguran dari desa adat. Jadi benar-benar kayak wanita bali kuno,” ceritanya.

Tak hanya Sumartini, suaminya pun mengalami hal serupa. Ketut Widana yang sehari-hari bekerja pada sebuah perusahaan bidang arsitektur terpaksa meninggalkan sementara pekerjaannya karena kegiatan adat yang harus dijalani setelah menikah. “Karena laki-laki yang sudah menikah harus *makemit* tiga hari sekali. Jadi dia juga belum bisa kembali ke Denpasar,” terang Sumartini.

Kerapnya penyelenggaraan kegiatan adat merupakan bagian dari cara mereka untuk

menjaga serta melestarikan tradisi di tengah godaan modernitas. Itu sebabnya, kegiatan adat di desa ini tak pernah putus sepanjang tahun. “Setiap bulan selalu ada kegiatan adat,” tutur Sumartini.

Menurut salah seorang tokoh adat Tenganan, I Mangku Widia, pasangan suami istri bagi adat Tenganan adalah sesuatu yang dipandang utuh. Pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sebagai tingkat kesempurnaan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan adat.



Tenganan juga memiliki awig-awig (aturan adat) yang secara tegas mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan Tenganan. Laki-laki dan perempuan Tenganan diwajibkan menikah dengan sesama Tenganan sendiri. Bila laki-laki Tenganan menikah dengan orang luar, konsekuensinya mereka harus pindah ke Banjar Pande. Sementara bagi perempuan yang menikah dengan orang luar desa, diwajibkan ke luar desa untuk mengikuti suaminya dan orang tuanya harus membayar denda kepada desa adat sebesar 75.000 uang kepeng atau setara dengan Rp.18.500.

Tenganan Pegringsingan terdiri atas tiga banjar adat, yakni Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Pande. Banjar Pande diperuntukkan bagi mereka yang terlahir cacat dan warga yang dianggap melanggar aturan adat, misalnya laki-laki yang menikah dengan perempuan luar desa.



PEREMPUAN TENGANAN

Meski mereka tinggal terpisah, warga memiliki hak yang sama dalam kehidupan dan juga dalam upacara adat. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan jadi bagian yang tak terpisahkan dari aturan adat Tenganan. Berbeda dengan budaya masyarakat Hindu Bali pada umumnya yang memberikan porsi hak lebih kepada kaum laki-laki, masyarakat Tenganan menerapkan hak waris yang sama, baik kepada anak laki-laki maupun perempuan.

Menurut Mangku Widia, persamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan menunjukkan sistem adat yang lebih baik di Tenganan Pegringsingan. “Makanya kebanyakan masyarakat Tenganan yang bekerja ke luar, akhirnya kembali juga ke Tenganan,” terangnya.

Aturan adat Tenganan juga melarang adanya praktik poligami. Bila seorang krama desa adat melakukan poligami, maka dia akan diturunkan secara tidak hormat dari jabatannya, dan kemudian menjadi warga adat biasa. Krama desa merupakan sebutan untuk warga adat di tingkatan tertinggi yang sekaligus bertugas sebagai perangkat adat. Selain krama desa, masyarakat Tenganan Pegringsingan juga terdiri atas dua struktur lainnya, yakni krama gumi –masyarakat adat biasa—dan krama gumi pulangan –krama desa yang sudah pensiun dari tugasnya karena pasangannya meninggal atau salah satu anaknya menikah. “Kalau melakukan poligami, dia kembali jadi krama gumi secara tidak hormat,” jelas Widia.

Meski disibukkan oleh kegiatan adat, menjadi warga adat Tenganan memberikan kebanggaan bagi para perempuan Tenganan, tak terkecuali Sumartini. “Pastinya bangga karena kita merasa dihargai sebagai perempuan,” ujarnya.

“Jadi perempuan Tenganan, bangga. Kan di sini perempuan juga dapat waris. Artinya, kita sejajar sama laki-laki,” ujar Ni Komang Andayani (40), perempuan Tenganan lainnya menimpali.[]

DIANGGAP AGAMA TAK RESMI, BAHA'I TERUS DIDERA DISKRIMINASI

Oleh: Nimas D. Deliah

Bagi pemeluk agama-agama mainstream di Indonesia, urusan administrasi kependudukan bukanlah suatu persoalan. Namun tidak demikian halnya dengan penganut kepercayaan Baha'i. Untuk mendapatkan dokumen kependudukan, seperti KTP, akta pernikahan, akta kelahiran saja mereka harus menghadapi sekian keruwetan pertanyaan, prosedur, dan ketentuan yang ada, hingga akhirnya tak jarang dari mereka yang kosong dokumen pribadi.

Coba tengok saja pengalaman pahit yang pernah dialami Adi, bukan nama sebenarnya, salah seorang penganut Baha'i di wilayah Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir Kodya Bandung, saat mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia mengalami kesulitan dan kebingungan ketika hendak mencantumkan nama agama yang dianutnya dalam KTP tersebut. Palsanya, dalam KTP tersebut tidak tersedia nama agamanya. Sistem komputerisasi hanya menyediakan kolom isian untuk 5 (lima) agama "resmi" versi negara.

Di luar agama 5 tersebut, tersedia kolom "Agama Lain". Adi pun digiring oleh petugas administrasi untuk mengisi kolom tersebut, namun ia menampikinya.

Adi tak mau menyerah. Ia berusaha agar agamanya bisa ditulis dalam lembar KTP tersebut dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Namun ketika petugas pembuatan KTP kelurahan Garuda ditanya apakah boleh kolom agama diisi secara manual? Petugas kelurahan menjawabnya dengan ketus: "Tidak bisa, sistemnya sudah baku dan tidak bisa diubah". Jika dipaksakan, lanjut petugas, KTP yang bersangkutan tidak akan mendapatkan legalisasi dari pihak kecamatan.

Adi pun menemui jalan buntu. Segala cara sia-sia dan semua tanya tak ada guna. Akhirnya, dengan terpaksa, Adi memilih agama Islam sebagai "agama KTP"-nya. Sebuah pilihan yang tidak sesuai dengan fakta dan hati nuraninya.

Muski sudah kena getah, namun perlakuan



diskriminasi atas dasar agama terhadapnya tidak cukup sampai di situ. Menurut Adi, Kantor Catatan Sipil Kota Bandung juga menolak membuatkan akta pernikahannya. Pasangan yang menikah pada tahun 2001 ini akhirnya harus menempuh jalan panjang untuk mendapatkan selebar akta nikah.

Berkali-kali dia dan istrinya mendatangi Kantor Capil, namun hasilnya tetap nihil. Petugas Capil hanya bersedia mencatatkan pernikahan pemohon beserta istri dengan satu sarat jika agama pemohon dikonversi ke agama resmi yang diakui Negara. Adi pun menolak. Baginya, keyakinan bukanlah hal yang bisa dipertukarkan. Mereka bersikukuh menikah menurut agamanya.

Keteguhan pasangan ini sedikit melunakkan sikap petugas Capil Kota Bandung. Petugas menganjurkan kepada pasangan ini untuk banding ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung, agar akta nikah mereka bisa diterbitkan atau melakukan *hearing* dengan DPRD untuk mendapatkan rekomendasi.

Karena merasa ragu banding ke PN, pasangan ini memilih langsung mendatangi DPRD. Namun apa yang terjadi? Pasangan yang diterima oleh beberapa wakil komisi DPRD ini malah disuruh taubat masuk Islam. Anjuran taubat oleh salah satu wakil komisi DPRD ini terang saja mengoyak batinnya. Adi kemudian menjelaskan bahwa agama Baha'i adalah agama independen, bukan aliran atau sekte dari agama tertentu. Meskipun demikian, penjelasan itu tak membuat wakil komisi

DPRD bersedia memberikan rekomendasi untuk pencatatan akta nikahnya.

Kesulitan semakin menghadangnya di kemudian hari. Beberapa tahun berselang, usai istrinya melahirkan anak pertama, akta nikah yang tak kunjung didapatkan dari Capil Kota Bandung berbuntut sial bagi anaknya. Permohonan pembuatan akta kelahiran anaknya ditolak karena tidak memiliki akta nikah orang tua.

Kekuatiran Adi kian tak terbendung, lantaran itu menyangkut nasib masa depan anaknya. Dalam situasi yang kalut, dirinya berusaha bangkit dan mencari cara untuk menyasinya. Berbagai usaha ditempuh, mulai dari cari-cari informasi hingga lobi. Akhirnya, akta kelahiran tersebut dapat diperoleh dari Pemkab Cianjur berkat bantuan seorang teman.

Untuk sementara, Adi bisa bernafas lega, tapi itu tak berlangsung lama. Persoalan kembali menyesak dada ketika anak keduanya lahir. Adi dihadang masalah serupa. Untuk kesekian kalinya, Capil menolak permohonannya. Bahkan, solusi yang ditawarkan Capil lebih kejam, pihaknya mau menerbitkan akta kelahiran tersebut dengan catatan status anaknya nanti tercatat sebagai anak yang lahir dari hasil hubungan gelap (di luar nikah), tanpa ayah. Syarat tersebut tentu memberatkan yang bersangkutan.

Tak hanya Adi, pengalaman serupa juga dialami oleh sejumlah penganut agama Baha'i di wilayah kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bahkan boleh dikata lebih naas. Bayangkan, pemeluk agama Baha'i di Banjaran ini sama sekali tidak diperbolehkan membuat KTP kecuali mereka pindah agama.

Dengan cara apa pun, pihak Kecamatan Banjaran tetap tidak bersedia menerbitkan kartu identitas penduduk tersebut. Alasannya, pemohon yang bersangkutan beragama Baha'i. Jika ingin mendapat perlakuan yang sama seperti penduduk lainnya, kata pihak Kecamatan Banjaran, mereka harus kembali ke agama Islam. []

MITOLOGI SITUS MEGALITIK GUNUNG PADANG

Oleh: Ingwuri H.

Judul film: GUNUNG PADANG: Sejarah Atau PraSejarah
Sutradara: Yogi Margana dan Ervin Ruhlelana

Rasa-rasanya, film dokumenter berdurasi 114 menit itu lama sekali. Sebagian besar penonton saat menyaksikan film berjudul *Gunung Padang: Sejarah atau Prasejarah* itu seperti tak sabar kira-kira kapan selesainya. Maka tidak mengherankan jika banyak penonton yang tak jenak menyimaknya, bahkan, ada pula yang tertidur saat film masih berlangsung.

Tak hanya sampai di situ, kebosanan itu pun kemudian menjalar ke season berikutnya. Usai film diputar, saat digelar diskusi, tinggal 40-an orang saja yang bertahan di kursi gedung Centre Culturel Français de Bandung (CCF Bandung) Jumat, 23 Januari 2009 lalu. Padahal, waktu pemutaran, lebih dari seratus lima puluh orang yang datang di sana.

Tapi, meski berkurang lebih dari dua per tiga penonton, diskusi yang digelar berlangsung *gayeng*. Tengok saja, dari alokasi waktu yang disediakan, tak cukup untuk menghasilkan satu titik temu antar para peserta dialog yang memiliki disiplin pengetahuan beragam itu.

Mereka, dengan horizon pengetahuannya, seperti menunjukkan kemampuan dan kapasitas keilmuan masing-masing. Maklum saja, yang datang dalam diskusi adalah para dedengkot akademisi, praktisi film, dan juga peneliti.

Suasana sore Bandung yang baru saja hujan itu tak mampu mendinginkan suasana forum. Perdebatan kian memanas saat para peserta beradu data dan argumen mengenai kapan situs megalitik terbesar se-Asia Tenggara itu dibangun. Semuanya tetap bertahan pada pendapatnya masing-masing, hingga tak didapat titik temunya. Malah, ada salah satu pembicara yang memilih undur diri di saat diskusi masih berlangsung. Padahal, masih ada peserta yang masih ingin mendebat sanggahan arsitek alumnus institut teknologi Bandung itu saat ia melontarkan beberapa kalimat sanggahannya.

Tentu menarik melihat diskusi ini. Karena, sebagian orang menganggap, semakin tua usia situs, menunjukkan betapa tuanya usia peradaban bangsa ini. Padahal, gerak sejarah adalah proses akumulasi dari berbagai peristiwa yang terus-menerus terbentuk, yang tidak hanya berhenti pada satu titik. Coba dengarkan ungkapan dalam



GUNUNG PADANG



foto: www.jalansaja.wordpress.com

bentuk tanya dari salah satu penanya dalam diskusi, “Kenapa harus memberi batasan sejarah dan presejarah? Apalagi sampai dipertegas dalam judul film?”

Situs Gunung Padang sendiri, ditemukan tahun 1878 oleh pak Suma, Endik dan Abidin. Gunung Padang, berada di desa Karya Mukti kecamatan Campaka kabupaten Cianjur.

Soal lamanya durasi, bukannya tak disadari oleh Ervin, narator sekaligus produser film ini. Ia sendiri se usai pemutaran film mengatakan, bahwa dirinya sengaja ingin mengubah konstruksi tentang film dokumenter di Indonesia yang selalu disandarkan pada panjang-pendeknya durasi.

Gunung Padang Dalam Film

Film dokumenter itu dibuka dengan pertanyaan, kenapa situs megalitik itu berdiri di Gunung Padang? Narator menambahkan dengan pertanyaan, peradaban seperti apa yang pernah ada di sini?

Setelah itu, film bercerita mulai dari jalan yang bisa diakses untuk menuju situs Gunung Padang, seberapa luas lokasi, termasuk pembagian ruang berdasar batu-batu yang tertata di kawasan itu.

Dalam film, sebagaimana peta yang dibuat Disbudpar Jawa Barat, digambarkan ada lima ruang yang terbagi berdasar susunan batu-batu yang beratnya berkisar dari 100 hingga 600 kilogram. Sementara, para peneliti mengatakan bahwa batu-batu yang disusun di Gunung Padang berasal dari

tempat yang jauh karena di sekitar kawasan tidak ditemukan ciri yang sama atas contoh batu. Sampai-sampai, Prof. Dr. Sampurno, Guru Besar Geologi ITB mengatakan, “Orang-orang dulu itu bukan primitif, tetapi orang modern pada zamannya, mungkin kita kalah,” katanya.

Lima bagian ini, oleh Bambang Setiawan, salah seorang arsitek yang diwawancarai, dikatakan bahwa batas-batas ruang didefinisikan dengan tekanan-tekanan batu dengan membaca ruangan dan bentuk elemen, dengan spasial semakin ke puncak semakin istimewa.

Lepas dari wacana akademis itu, sisi-sisi lain tampaknya menarik untuk ditelisik. Gerak mitologi yang sama sekali terlepas dari debat akademis tampak terus terproduksi seiring berjalannya waktu. Mitos itu misalnya, dikabarkan bahwa kawasan ini dulu menjadi tempat singgah (petilasan) Prabu Siliwangi.

Sementara, di tempat sebelum masuk ke situs, juga terdapat sumur yang diberi nama Kahuripan, yang menurut penduduk, kalau cuci muka atau mandi di sumur itu akan mudah mendapat jodoh. Bahkan, sumur Kahuripan ada yang menyebutnya “Sumur Cinta”.

Di tangga batunya sendiri, yang menjadi jalan menuju ke pusat situs, juga terdapat mitos, bagi yang mencoba menghitung jumlah undakan, tak pernah sama bagi masing-masing orang. Dan hingga saat ini, tempat itu juga menjadi tempat bagi sebagian orang untuk berdoa dan meminta.[]

RESPON DARURAT INSIDEN 22 JANUARI 2009 DI KEDUMULYO

Oleh: Muhammad Kodim

Rencana pembangunan pabrik semen, PT Semen Gresik (tbk) di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, telah menuai protes dan penolakan dari warga sekitar. Kini persoalan bertambah kompleks setelah terjadi insiden kekerasan yang dilakukan satuan Brimob Pati pada hari Kamis, 22 Januari 2009 lalu di desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Insiden kekerasan itu berujung pada penangkapan dan penahanan sembilan orang warga, yang kemudian mengalami penyiiksaan.

Menyikapi kasus tersebut, tepatnya 27 – 29 Januari 2009, DESANTARA Foundation bersama dengan beberapa organisasi di Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Tolak Semen Gresik di Sukolilo melakukan Roadshow ke beberapa instansi terkait. Roadshow ini dilakukan bersama dengan 6 ibu-ibu warga pati yang menjadi korban kekerasan dalam insiden itu. Berikut detail agenda Roadshow:

Selasa, 27 Januari 2009: Pukul 11.30 WIB, warga didampingi Jaringan Advokasi mendatangi kantor Propam. Aduan ke Propam berupa pelanggaran disiplin, tidak bersikap sopan dan santun terhadap masyarakat, dan menyalahgunakan

wewenang, dengan No. Laporan : No. Pol : STPL /13 / I /2009 / YANDUAN.

Pukul 13.40 WIB, warga mendatangi kantor Kompolnas dengan substansi aduan yang sama. Hasilnya, Kompolnas akan berkoordinasi dengan Propam, Komnas HAM dan Komnas Perempuan berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam insiden tersebut.

Pukul 15.00 WIB, warga mendatangi kantor Ombudsman. Hasilnya, akan membentuk tim kecil (terdiri dari Aliansi Tolak Semen dan Ombudsman) untuk melakukan pengkajian tindak lanjut dari persoalan ini. Ombudsman juga akan mengambil tindakan pemanggilan dan teguran terhadap pemerintah daerah bersangkutan.

Rabu, 28 Januari 2009: Pukul 11.00 WIB, warga dan tim advokasi mendatangi kantor Komnas Perempuan. Tindaklanjutnya, Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menekan Polda Jateng.

Pukul 13.00 WIB, warga mendatangi Komnas HAM. Hasilnya, Komnas HAM akan turun ke lapangan dalam minggu ini; mendatangi Polres Pati dan Polda Jawa

Tengah; menanyakan ke Propam terkait tindak kekerasan tersebut; mendorong adanya Pemberkasan (BAP 9 tersangka) ulang; mengecek masalah kesehatan tersangka, dan akses hukum bagi keluarga dan tim bantuan hukum.

Pukul 16.00 WIB, warga mendatangi Kantor PBNU, mengadakan kasus tersebut kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut Gus Dur, persoalan Pati ini tidak akan bisa diselesaikan di level daerah, tapi harus nasional yang bertindak. Karenanya, Gus Dur akan menghadang Semen Gresik di level nasional.

Kamis, 29 Januari 2009: Pukul 11.00 WIB, warga mendatangi kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Diketahui bahwa tanggal 5 Januari 2009, KLH sudah melayangkan surat ke BLH Jawa Tengah perihal peninjauan ulang AMDAL dan penegasan bahwa sampai permasalahan AMDAL belum selesai, maka tidak boleh ada aktivitas apapun yang terkait dengan rencana pembangunan PT. Semen Gresik. Sampai saat ini, KLH juga belum mendapatkan tembusan terkait dengan pengesahan AMDAL tersebut.

Roadshow di Jakarta ditutup dengan melakukan aksi di depan Gedung Indorama, pusat perkantoran PT Semen Gresik, tepatnya di lantai 17.[]

MEMBACA SRINTHIL DI KAMPUNG PESANTREN CIREBON

Oleh: Franditya Utomo

Delapan tahun sudah Jurnal Srinthil hadir di hadapan pembaca (khususnya perempuan) dalam format semi jurnal; berusaha memberi sumbangsih pengetahuan dengan mengungkap gagasan perempuan multikultural dan kemudian meletakkannya diantara deret panjang referensi yang sudah ada. Kali ini, pihak pengelola Srinthil ingin mengetahui pendapat pembaca perempuan melalui sebuah kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2009, di sebuah kampung pesantren, Babakan-Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat.

Forum tersebut berusaha menguliti sejumlah persoalan yang terkait dengan Jurnal Srinthil mulai dari perwajahan, kesesuaian perwajahan dengan isi, topik yang diangkat, para penulis yang masih banyak laki-laki, hingga huruf yang relatif kecil. Ketertarikan untuk mendiskusikan beberapa edisi terakhir (edisi 14, 15, dan 16) muncul dari persepsi umum "Srinthil selama ini hanya membahas persoalan perempuan seni tradisi saja".

"Saya cocok dengan edisi Jejak Negosiasi Perempuan Aceh ini, soalnya cocok dengan sejarah perempuan di sana, bahwa memang zaman dahulu perempuan menjadi

pemimpin bahkan panglima perang," komentar salah satu peserta.

Proses FGD berlangsung dari siang sampai sore hari. Nampaknya pembaca perempuan di kampung pesantren itu cukup paham bahwa saat ini Srinthil mencoba menyoal dilema perempuan multikultural di berbagai ranah pengetahuan dan lokus sosial. Srinthil ingin lebih membumi dalam konteks keberagaman, menyeruak di tengah riuh rendah pertarungan kelompok dominan-marjinal, kritis pada penafsiran tunggal tentang masyarakat dan sebuah kebudayaan, serta sederhana dalam penyajian.[]